



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43/KM.7/2024

TENTANG

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGHENTIAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT, DANA
BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN, DAN DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghentian Penyaluran Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 505);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHENTIAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT, DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN, DAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan penghentian penyaluran:

- a. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit Tahun Anggaran 2024;
- b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2024; dan
- c. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024,

dengan besaran dan rincian menurut daerah provinsi/kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Rekening Kas Umum Negara.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Gubernur/Bupati/Wali Kota bersangkutan;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2024

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR [43/KM.7/2024](#)
TENTANG
PENGHENTIAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL
PERKEBUNAN SAWIT, DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
KEHUTANAN, DAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMPAKAU TAHUN ANGGARAN 2024

A. RINCIAN PENGHENTIAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL SAWIT TAHUN ANGGARAN 2024 MENURUT DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

No.	Daerah	Periode Penghentian		Total	Persentase Penghentian terhadap Alokasi (%)
		Tahap I	Tahap II		
1	2	3	4	5	6
1.	Provinsi Jawa Barat	-	3.670.857.500	3.670.857.500	50%
2.	Kab. Ciamis	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	100%
3.	Kota Bandung	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	100%
4.	Kota Bekasi	-	500.000.000	500.000.000	50%
5.	Kab. Bandung Barat	1.455.257.500	1.455.257.500	2.910.515.000	100%
6.	Provinsi Papua	-	1.615.236.000	1.615.236.000	50%
7.	Kab. Keerom	2.620.032.500	2.620.032.500	5.240.065.000	100%
8.	Kab. Halmahera Tengah	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	100%
9.	Kab. Tangerang	-	500.000.000	500.000.000	50%
10.	Kota Tangerang Selatan	-	500.000.000	500.000.000	50%
11.	Kab. Mimika	-	1.626.681.000	1.626.681.000	50%

No.	Daerah	Periode Penghentian		Total	Persentase Penghentian terhadap Alokasi (%)
		Tahap I	Tahap II		
12.	Kab. Paniai	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	100%
13.	Kab. Raja Ampat	-	500.000.000	500.000.000	50%
14.	Kota Sorong	-	500.000.000	500.000.000	50%
Total		6.075.290.000	15.488.064.500	21.563.354.500	0,72%

Keterangan:

- 1) Penghentian penyaluran sebesar 50% karena Daerah tidak menyampaikan:
 - a. Dokumen syarat salur tahap I, yaitu: Rancangan Kegiatan dan Penganggaran DBH Sawit Tahun Anggaran 2024, Laporan Realisasi Penggunaan DBH Sawit Tahun Anggaran 2023, dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penggunaan DBH Sawit Tahun Anggaran 2023 (Bagi Provinsi); atau
 - b. Dokumen syarat salur tahap II, yaitu: Laporan Realisasi Penggunaan DBH Sawit Semester I Tahun Anggaran 2024, dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penggunaan DBH Sawit Semester I Tahun Anggaran 2024 (Bagi Provinsi).
- 2) Penghentian penyaluran sebesar 100% karena Daerah tidak menyampaikan:
 - a. Dokumen syarat salur tahap I, yaitu: Rancangan Kegiatan dan Penganggaran DBH Sawit Tahun Anggaran 2024, Laporan Realisasi Penggunaan DBH Sawit Tahun Anggaran 2023, dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penggunaan DBH Sawit Tahun Anggaran 2023 (Bagi Provinsi); dan
 - b. Dokumen syarat salur tahap II, yaitu: Laporan Realisasi Penggunaan DBH Sawit Semester I Tahun Anggaran 2024, dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penggunaan DBH Sawit Semester I Tahun Anggaran 2024 (Bagi Provinsi).

B. RINCIAN PENGHENTIAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2024 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

1. RINCIAN PENGHENTIAN PENYALURAN ATAS KETIDAKPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2024 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

No.	Pemerintah Daerah	DBH SDA Kehutanan TA 2024						Periode Penghentian	
		Dana Reboisasi (DR)		Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)		Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			Total
		Jumlah	% terhadap alokasi	Jumlah	% terhadap alokasi	Jumlah	% terhadap alokasi		
1.	Kab. Aceh Barat	-	-	-	-	24.842.000	100%	24.842.000	Triwulan I, II, III, IV
2.	Kab. Aceh Selatan	-	-	-	-	3.899.100	30%	3.899.100	Triwulan I, II
3.	Kab. Aceh Singkil	-	-	-	-	7.824.600	70%	7.824.600	Triwulan III, IV
4.	Kota Langsa	-	-	-	-	16.991.000	100%	16.991.000	Triwulan I, II, III, IV
5.	Kab. Aceh Barat Daya	-	-	-	-	5.322.300	30%	5.322.300	Triwulan I, II
6.	Kab. Nagan Raya	-	-	-	-	11.138.310	41%	11.138.310	Triwulan I, II
7.	Kab. Bener Meriah	-	-	-	-	23.361.100	70%	23.361.100	Triwulan III, IV
8.	Kota Subulussalam	-	-	-	-	3.890.100	30%	3.890.100	Triwulan I, II
9.	Kab. Labuhanbatu	-	-	-	-	257.504.000	100%	257.504.000	Triwulan I, II, III, IV
10.	Kab. Langkat	-	-	-	-	85.322.300	70%	85.322.300	Triwulan III, IV
11.	Kab. Agam	-	-	-	-	56.839.000	100%	56.839.000	Triwulan I, II, III, IV
12.	Kab. Dharmasraya	-	-	-	-	329.574.000	100%	329.574.000	Triwulan I, II, III, IV
13.	Kab. Solok Selatan	-	-	-	-	137.233.000	100%	137.233.000	Triwulan I, II, III, IV
14.	Kab. Muaro Jambi	-	-	-	-	2.832.587.000	100%	2.832.587.000	Triwulan I, II, III, IV
15.	Kab. Sarolangun	-	-	-	-	1.391.801.600	70%	1.391.801.600	Triwulan III, IV
16.	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	-	-	-	6.394.327.000	100%	6.394.327.000	Triwulan I, II, III, IV
17.	Kab. Muara Enim	-	-	-	-	3.063.654.000	100%	3.063.654.000	Triwulan I, II, III, IV
18.	Kab. Lebong	-	-	-	-	72.978.500	70%	72.978.500	Triwulan III, IV
19.	Provinsi Lampung	1.939.000	100%	-	-	-	-	1.939.000	Triwulan I, II, III, IV
20.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	46.323.200	70%	-	-	-	-	46.323.200	Triwulan III, IV
21.	Kab. Karimun	-	-	-	-	66.720.000	100%	66.720.000	Triwulan I, II, III, IV
22.	Kab. Bintan	-	-	-	-	9.346.400	70%	9.346.400	Triwulan III, IV
23.	Kab. Landak	-	-	-	-	217.675.500	70%	217.675.500	Triwulan III, IV
24.	Kab. Barito Selatan	-	-	837.416.300	70%	1.810.197.900	70%	2.647.614.200	Triwulan III, IV
25.	Kota Palangkaraya	-	-	-	-	2.572.632.000	100%	2.572.632.000	Triwulan I, II, III, IV

No.	Pemerintah Daerah	DBH SDA Kehutanan TA 2024						Total	Periode Penghentian
		Dana Reboisasi (DR)		Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)		Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
		Jumlah	% terhadap alokasi	Jumlah	% terhadap alokasi	Jumlah	% terhadap alokasi		
26.	Kab. Murung Raya	-	-	2.212.020.000	100%	9.338.198.000	100%	11.550.218.000	Triwulan I, II, III, IV
27.	Kota Kotamobagu	-	-	-	-	562.000	100%	562.000	Triwulan I, II, III, IV
28.	Kab. Buol	-	-	-	-	202.931.000	100%	202.931.000	Triwulan I, II, III, IV
29.	Kab. Morowali	-	-	-	-	157.899.300	30%	157.899.300	Triwulan I, II
30.	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	-	-	-	-	31.007.000	100%	31.007.000	Triwulan I, II, III, IV
31.	Kab. Luwu Timur	-	-	-	-	273.139.000	100%	273.139.000	Triwulan I, II, III, IV
32.	Kab. Sidenreng Rappang	-	-	-	-	12.844.000	100%	12.844.000	Triwulan I, II, III, IV
33.	Kab. Konawe	-	-	-	-	125.340.000	30%	125.340.000	Triwulan I, II
34.	Kab. Muna	-	-	-	-	104.113.000	100%	104.113.000	Triwulan I, II, III, IV
35.	Kab. Konawe Utara	-	-	-	-	271.215.000	100%	271.215.000	Triwulan I, II, III, IV
36.	Kab. Buton Utara	-	-	-	-	79.062.000	100%	79.062.000	Triwulan I, II, III, IV
37.	Kab. Buton Selatan	-	-	-	-	25.456.000	100%	25.456.000	Triwulan I, II, III, IV
38.	Kab. Gorontalo Utara	-	-	-	-	62.200.000	100%	62.200.000	Triwulan I, II, III, IV
39.	Kab. Mamuju	-	-	-	-	166.354.000	100%	166.354.000	Triwulan I, II, III, IV
40.	Kab. Pasangkayu	-	-	-	-	28.197.000	100%	28.197.000	Triwulan I, II, III, IV
41.	Kab. Bima	-	-	-	-	83.120.000	100%	83.120.000	Triwulan I, II, III, IV
42.	Kab. Lombok Tengah	-	-	-	-	37.685.000	100%	37.685.000	Triwulan I, II, III, IV
43.	Kab. Sumbawa Barat	-	-	-	-	221.539.000	100%	221.539.000	Triwulan I, II, III, IV
44.	Kab. Mamberamo Raya	-	-	-	-	1.347.838.000	100%	1.347.838.000	Triwulan I, II, III, IV
45.	Kab. Waropen	-	-	-	-	650.510.000	100%	650.510.000	Triwulan I, II, III, IV
46.	Provinsi Papua Pegunungan	10.381.643.000	100%	-	-	-	-	10.381.643.000	Triwulan I, II, III, IV
47.	Kab. Halmahera Timur	-	-	-	-	458.562.300	70%	458.562.300	Triwulan III, IV
48.	Kota Tidore Kepulauan	-	-	-	-	502.854.100	70%	502.854.100	Triwulan III, IV
49.	Kab. Pulau Morotai	-	-	-	-	140.524.000	100%	140.524.000	Triwulan I, II
50.	Kab. Pulau Taliabu	-	-	-	-	143.783.100	30%	143.783.100	Triwulan I, II
51.	Kab. Maybrat	-	-	-	-	881.901.000	100%	881.901.000	Triwulan I, II, III, IV
52.	Kab. Teluk Bintuni	-	-	3.714.253.900	70%	7.906.386.600	70%	11.620.640.500	Triwulan III, IV
53.	Kab. Sorong	-	-	-	-	2.096.468.000	100%	2.096.468.000	Triwulan I, II, III, IV
54.	Kab. Sorong Selatan	-	-	-	-	658.461.300	70%	658.461.300	Triwulan III, IV
55.	Kab. Tambrau	-	-	-	-	986.157.000	100%	986.157.000	Triwulan I, II, III, IV
Total		10.429.905.200		6.763.690.200		46.389.967.410		63.583.562.810	

2. RINCIAN PENGHENTIAN PENYALURAN ATAS KETIDAKSESUAIAN KETENTUAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2024 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

No.	Pemerintah Daerah	DBH SDA Kehutanan TA 2024						Periode Penghentian	
		Dana Reboisasai (DR)		Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)		Provisni Sumber Daya Hutan (PSDH)			Total
		Jumlah	% terhadap alokasi	Jumlah	% terhadap alokasi	Jumlah	% terhadap alokasi		
1.	Kab. Asahan	-	-	-	-	21.295.800	15%	21.295.800	Triwulan I, II, III, IV
2.	Kab. Batanghari	-	-	-	-	417.394.530	11%	417.394.530	Triwulan III, IV
3.	Kab. Belitung	-	-	-	-	1.122.346	11%	1.122.346	Triwulan III, IV
4.	Kab. Banggai	-	-	-	-	18.260.970	11%	18.260.970	Triwulan III, IV
5.	Kab. Buru Selatan	-	-	-	-	395.254.966	11%	395.254.966	Triwulan III, IV
6.	Provinsi Maluku Utara	1.666.510.546	11%	-	-	-	-	1.666.510.546	Triwulan III, IV
7.	Kab. Halmahera Utara	-	-	-	-	15.756.720	11%	15.756.720	Triwulan III, IV
8.	Provinsi Papua Barat	7.175.076.090	11%	-	-	-	-	7.175.076.090	Triwulan III, IV
Total		8.841.586.636		-		869.085.332		9.710.671.968	

C. RINCIAN PENGHENTIAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2024 MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

No.	Pemerintah Daerah	Nilai Penghentian Salur	Periode Penghentian	Persentase Penghentian terhadap Alokasi (%)
1	2	3	4	5
1	Provinsi Aceh	2.456.781.000	Triwulan III dan IV	50%
2	Kab. Aceh Jaya	8.375.400	Triwulan I	3%
3	Kab. Bireuen	8.415.000	Triwulan I	3%
4	Kab. Gayo Lues	54.530.340	Triwulan I	3%
5	Provinsi Riau	682.110	Triwulan I, Triwulan III dan IV	53%
6	Kab. Bengkalis	73.000	Triwulan I dan Triwulan II	50%
7	Kab. Indragiri Hilir	73.000	Triwulan I dan Triwulan II	50%
8	Kab. Indragiri Hulu	146.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
9	Kab. Kampar	4.380	Triwulan I	3%
10	Kab. Kepulauan Meranti	146.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
11	Kab. Kuantan Singingi	4.380	Triwulan I	3%
12	Kab. Pelalawan	146.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
13	Kab. Rokan Hilir	4.380	Triwulan I	3%
14	Kab. Rokan Hulu	146.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
15	Kab. Siak	77.380	Triwulan I, Triwulan III dan IV	53%
16	Kota Dumai	77.380	Triwulan I, Triwulan III dan IV	53%
17	Kota Pekanbaru	57.870	Triwulan I	3%
18	Provinsi Jambi	7.382.460	Triwulan I	3%

No.	Pemerintah Daerah	Nilai Penghentian Salur	Periode Penghentian	Persentase Penghentian terhadap Alokasi (%)
19	Kab. Batanghari	922.830	Triwulan I	3%
20	Kab. Bungo	922.830	Triwulan I	3%
21	Kab. Merangin	1.146.750	Triwulan I	3%
22	Kab. Muaro Jambi	30.761.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
23	Kab. Sarolangun	16.303.330	Triwulan I, Triwulan III dan IV	53%
24	Kab. Tanjung Jabung Barat	30.761.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
25	Kab. Tanjung Jabung Timur	16.303.330	Triwulan I, Triwulan III dan IV	53%
26	Kab. Tebo	30.761.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
27	Kota Jambi	30.761.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
28	Kota Sungai Penuh	55.954.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
29	Provinsi Sumatera Selatan	1.892.160	Triwulan I	3%
30	Kab. Banyuasin	2.611.310	Triwulan I, Triwulan III dan IV	53%
31	Kab. Empat Lawang	2.463.500	Triwulan I dan Triwulan II	50%
32	Kab. Lahat	2.571.990	Triwulan I	3%
33	Kab. Muara Enim	4.927.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
34	Kab. Musi Banyuasin	147.810	Triwulan I	3%
35	Kab. Musi Rawas	2.611.310	Triwulan I, Triwulan III dan IV	53%
36	Kab. Musi Rawas Utara	4.927.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
37	Kab. Ogan Ilir	147.810	Triwulan I	3%
38	Kab. Ogan Komering Ilir	2.611.310	Triwulan I, Triwulan III dan IV	53%
39	Kab. Ogan Komering Ulu	4.927.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%

No.	Pemerintah Daerah	Nilai Penghentian Salur	Periode Penghentian	Persentase Penghentian terhadap Alokasi (%)
40	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	6.898.000	Triwulan I dan Triwulan II	50%
41	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2.463.500	Triwulan I dan Triwulan II	50%
42	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2.463.500	Triwulan I dan Triwulan II	50%
43	Kota Lubuk Linggau	4.927.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
44	Kota Pagar Alam	4.927.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
45	Kota Palembang	4.927.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
46	Kota Prabumulih	4.927.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
47	Kab. Lampung Selatan	3.929.550	Triwulan I	3%
48	Kab. Lampung Tengah	4.442.940	Triwulan I	3%
49	Kab. Pesawaran	6.365.580	Triwulan I	3%
50	Kab. Tanggamus	5.627.310	Triwulan I	3%
51	Kab. Tulang Bawang Barat	3.682.710	Triwulan I	3%
52	Kab. Way Kanan	4.372.230	Triwulan I	3%
53	Kota Bandar Lampung	3.843.570	Triwulan I	3%
54	Kab. Cirebon	272.492.250	Triwulan I	3%
55	Kab. Indramayu	216.236.850	Triwulan I	3%
56	Kab. Karawang	4.037.782.560	Triwulan I	3%
57	Kab. Sukabumi	216.368.010	Triwulan I	3%
58	Provinsi Sulawesi Tenggara	9.000	Triwulan I dan Triwulan II	50%
59	Kab. Bombana	2.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
60	Kab. Buton	2.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%

No.	Pemerintah Daerah	Nilai Penghentian Salur	Periode Penghentian	Persentase Penghentian terhadap Alokasi (%)
61	Kab. Buton Selatan	2.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
62	Kab. Buton Tengah	1.060	Triwulan I, Triwulan III dan IV	53%
63	Kab. Buton Utara	2.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
64	Kab. Kolaka	2.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
65	Kab. Kolaka Timur	1.000	Triwulan I dan Triwulan II	50%
66	Kab. Kolaka Utara	2.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
67	Kab. Konawe	2.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
68	Kab. Konawe Kepulauan	2.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
69	Kab. Konawe Selatan	2.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
70	Kab. Konawe Utara	2.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
71	Kab. Muna	2.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
72	Kab. Muna Barat	2.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
73	Kab. Wakatobi	2.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
74	Kota Bau bau	2.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
75	Kota Kendari	33.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
76	Provinsi Banten	252.621.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
77	Kab. Lebak	45.110.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
78	Kab. Pandeglang	45.110.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
79	Kab. Serang	45.110.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
80	Kab. Tangerang	197.987.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
81	Kota Cilegon	45.110.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%

No.	Pemerintah Daerah	Nilai Penghentian Salur	Periode Penghentian	Persentase Penghentian terhadap Alokasi (%)
82	Kota Serang	45.110.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
83	Kota Tangerang	68.305.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
84	Kota Tangerang Selatan	202.857.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
85	Provinsi Kepulauan Riau	1.498.020	Triwulan I	3%
86	Kab. Karimun	5.513.590	Triwulan I, Triwulan III dan IV	53%
87	Kab. Kepulauan Anambas	312.090	Triwulan I	3%
88	Kab. Natuna	312.090	Triwulan I	3%
89	Kota Tanjung Pinang	312.090	Triwulan I	3%
90	Kab. Bangkalan	793.771.770	Triwulan I	3%
91	Provinsi Kalimantan Barat	6.953.580	Triwulan I	3%
92	Kab. Kapuas Hulu	668.610	Triwulan I	3%
93	Kab. Ketapang	668.610	Triwulan I	3%
94	Kab. Landak	668.610	Triwulan I	3%
95	Kab. Sambas	668.610	Triwulan I	3%
96	Kab. Sanggau	668.610	Triwulan I	3%
97	Provinsi Kalimantan Selatan	3.667.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
98	Kab. Balangan	202.460	Triwulan I, Triwulan III dan IV	53%
99	Kab. Banjar	382.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
100	Kab. Barito Kuala	382.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
101	Kab. Hulu Sungai Selatan	382.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
102	Kab. Hulu Sungai Tengah	382.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%

No.	Pemerintah Daerah	Nilai Penghentian Salur	Periode Penghentian	Persentase Penghentian terhadap Alokasi (%)
103	Kab. Hulu Sungai Utara	382.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
104	Kab. Kotabaru	191.000	Triwulan I dan Triwulan II	50%
105	Kab. Tabalong	382.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
106	Kab. Tanah Bumbu	382.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
107	Kab. Tanah Laut	382.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
108	Kab. Tapin	382.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
109	Kota Banjarbaru	382.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
110	Kota Banjarmasin	5.501.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
111	Kab. Dairi	19.957.110	Triwulan I	3%
112	Kab. Nias Barat	7.991.250	Triwulan I	3%
113	Kab. Padang Lawas Utara	7.991.250	Triwulan I	3%
114	Kab. Simalungun	26.600.490	Triwulan I	3%
115	Kab. Tapanuli Selatan	8.762.040	Triwulan I	3%
116	Kota Gunungsitoli	7.991.250	Triwulan I	3%
117	Kab. Pesisir Selatan	1.078.290	Triwulan I	3%
118	Kota Bukit Tinggi	1.078.290	Triwulan I	3%
119	Provinsi Gorontalo	156.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
120	Kab. Boalemo	38.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
121	Kab. Bone Bolango	38.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
122	Kab. Gorontalo	231.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
123	Kab. Gorontalo Utara	38.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%

No.	Pemerintah Daerah	Nilai Penghentian Salur	Periode Penghentian	Persentase Penghentian terhadap Alokasi (%)
124	Kab. Pohuwato	38.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
125	Kota Gorontalo	38.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
126	Provinsi Kalimantan Tengah	43.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
127	Kab. Barito Selatan	3.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
128	Kab. Barito Timur	3.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
129	Kab. Barito Utara	3.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
130	Kab. Gunung Mas	3.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
131	Kab. Kapuas	3.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
132	Kab. Katingan	3.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
133	Kab. Kotawaringin Barat	3.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
134	Kab. Kotawaringin Timur	3.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
135	Kab. Lamandau	3.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
136	Kab. Murung Raya	3.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
137	Kab. Pulang Pisau	3.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
138	Kab. Seruyan	3.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
139	Kab. Sukamara	1.590	Triwulan I, Triwulan III dan IV	53%
140	Kota Palangkaraya	54.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
141	Provinsi Kalimantan Timur	4.046.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
142	Kab. Berau	561.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
143	Kab. Kutai Barat	16.830	Triwulan I	3%
144	Kab. Kutai Kartanegara	16.830	Triwulan I	3%

No.	Pemerintah Daerah	Nilai Penghentian Salur	Periode Penghentian	Persentase Penghentian terhadap Alokasi (%)
145	Kab. Kutai Timur	561.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
146	Kab. Mahakam Ulu	561.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
147	Kab. Paser	561.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
148	Kab. Penajam Paser Utara	561.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
149	Kota Balikpapan	802.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
150	Kota Bontang	561.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
151	Kota Samarinda	5.822.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
152	Kab. Banggai Laut	469.500	Triwulan I	3%
153	Kab. Buol	15.650.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
154	Kab. Donggala	8.294.500	Triwulan I, Triwulan III dan IV	53%
155	Kab. Morowali	7.825.000	Triwulan I dan Triwulan II	50%
156	Kab. Morowali Utara	7.825.000	Triwulan I dan Triwulan II	50%
157	Kab. Parigi Moutong	2.324.400	Triwulan I	3%
158	Kab. Poso	7.825.000	Triwulan I dan Triwulan II	50%
159	Kab. Sigi	469.500	Triwulan I	3%
160	Kab. Tojo Una Una	7.825.000	Triwulan III dan IV	50%
161	Kota Palu	4.244.130	Triwulan I	3%
162	Provinsi Bali	21.559.890	Triwulan I	3%
163	Kab. Badung	7.314.390	Triwulan I	3%
164	Kab. Tabanan	3.951.090	Triwulan I	3%
165	Kab. Timor Tengah Utara	3.153.510	Triwulan I	3%

No.	Pemerintah Daerah	Nilai Penghentian Salur	Periode Penghentian	Persentase Penghentian terhadap Alokasi (%)
166	Provinsi Kalimantan Utara	103.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
167	Kab. Bulungan	32.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
168	Kab. Malinau	32.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
169	Kab. Nunukan	32.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
170	Kab. Tana Tidung	32.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
171	Kota Tarakan	4.620	Triwulan I	3%
172	Provinsi Maluku Utara	36.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
173	Kabupaten Halmahera Barat	5.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
174	Kabupaten Halmahera Selatan	54.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
175	Kabupaten Halmahera Tengah	5.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
176	Kabupaten Halmahera Timur	5.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
177	Kabupaten Halmahera Utara	5.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
178	Kabupaten Kepulauan Sula	5.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
179	Kabupaten Pulau Morotai	5.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
180	Kabupaten Pulau Taliabu	5.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
181	Kota Ternate	5.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
182	Kota Tidore Kepulauan	5.000	Triwulan I, II, III, dan IV	100%
Total		9.556.356.460		0,19%

Keterangan:

- 1) Penghentian penyaluran sebesar 3% (sanksi $15\% \times$ Persentase Penyaluran Triwulan I (20%)) karena Daerah tidak memenuhi ketentuan proporsi alokasi penggunaan DBH CHT pada Laporan Realisasi Penggunaan DBH CHT sampai dengan Semester Kedua Tahun Anggaran 2023.
 - 2) Penghentian penyaluran sebesar 50% karena Daerah tidak menyampaikan:
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan DBH CHT sampai dengan Semester Kedua Tahun Anggaran 2023 pada Triwulan I dan II; atau
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan DBH CHT sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 pada Triwulan III dan Triwulan IV.
 - 3) Penghentian penyaluran sebesar 100% karena Daerah tidak menyampaikan:
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan DBH CHT sampai dengan Semester Kedua Tahun Anggaran 2023 pada Triwulan I dan II; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan DBH CHT sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 pada Triwulan III dan Triwulan IV.
-

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN

